

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI 10 DESA WILAYAH KECAMATAN REMBANG KABUPATEN REMBANG

Yudhi Prasetyo

Alumni Pogram Pasca Sarjana Unversitas Stikubank Semarang

Gregorius Nasiansenus Masdjojo

Pogram Pasca Sarjana Unversitas Stikubank Semarang

gregymasdjojo@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah berjalan dengan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang masih belum optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ADD di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang meliputi komunikasi, kemampuan sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Diantara faktor-faktor tersebut, hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor kemampuan sumberdaya serta faktor ukuran dan tujuan kebijakan yang sangat kuat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa, Kemampuan Sumber Daya, Sikap Pelaksana, Struktur Birokrasi.

Abstract

Implementation of Policy of ADD in Subdistrict of Rembang of Regency of Rembang have walked enough is fluent. But that way if hooked; correlated farther with attainment of target of execution of Allocation of Countryside Fund (ADD) in Subdistrict of Rembang of Regency of Apex still not yet optimal. As for factors influencing execution of ADD in Subdistrict of Rembang of Regency of Rembang cover communications, resource ability, executor attitude, bureaucracy structure, environmental and also size measure and policy target. Among/Between the factors, result of this research lay open that factor of ability of sumberdaya and also factor of size measure and target of very strong policy have an effect on to implementation of policy of policy of ADD in Subdistrict of Rembang of Rembang Regency.

Keyword : Allocation of Countryside Fund, Resource Ability, Executor Attitude, Bureaucracy Structure.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Konsekuensi logis dari lahirnya konsep otonomi daerah adalah hadirnya desentralisasi fiskal. Sistem desentralisasi fiskal yang berlangsung dengan melibatkan desa sebagai sasaran distribusinya melahirkan implikasi pada kebijakan transfer dana dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam kerangka otonomi desa, segala bentuk urusan pemerintahan desa menjadi kewenangan desa, termasuk salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana

Desa (ADD). ADD dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Rembang kepada Desa pada tahun 2013 diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Rembang Tahun 2013. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa penggunaan ADD agar selalu didasarkan pada skala prioritas tingkat desa yang merupakan hasil musrenbangdes. Implementasi ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa secara berjenjang kepada

Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati juga tersebut mengamanatkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD, yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa sampai ke Tingkat Kabupaten.

Keseluruhan besaran ADD yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rembang Tahun 2013 sebesar Rp.18,2 milyar yang dibagi kepada 294 Desa/Kelurahan di 14 kecamatan dalam komposisi proporsional tiap desa yang terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimum dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Dengan pembagian tersebut diperoleh Alokasi Dana Desa tertinggi adalah Kecamatan Rembang dengan alokasi sebesar Rp.1,92 milyar.

Kecamatan Rembang sebagai ibukota Kabupaten Rembang yang merupakan penyangga utama kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang dimana mengandalkan perekonomian dari kegiatan perdagangan, pertanian, perikanan dan jasa. Total penerimaan ADD di Kecamatan Rembang selama 5 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mencapai angka Rp.10,997,191,052 atau mencapai 10% dari total alokasi ADD di Kabupaten Rembang yang dibagi untuk 34 Desa/Kelurahan.

Implementasi ADD khususnya di Kecamatan Rembang telah berjalan dengan lancar. Namun demikian dalam implementasi tersebut masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Sebagai contoh adalah masih rendahnya Pendapatan Asli Desa dibandingkan dengan Alokasi dana Desa yang diterima. Kendala implementasi ADD dijumpai juga pada lemahnya pengelolaan alokasi dana desa baik bersumber dari unsur pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakatan di desa. Pada prakteknya, implementasi ADD disinyalir belum sepenuhnya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam petunjuk operasionalnya baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan dan pertanggungjawaban kegiatan. Permasalahan lainnya adalah masih kurangnya pemberdayaan masyarakat yang dapat dinilai dari rendahnya partisipasi swadaya gotong royong masyarakat desa di wilayah Kecamatan Rembang dalam proses kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD.

Rumusan Masalah

Pada hakekatnya persoalan yang muncul dalam implementasi ADD tersebut sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor antara lain: komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan, bentuk struktur birokrasi, kondisi lingkungan, dan tujuan kebijakan. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut serta latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana faktor-faktor komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan, bentuk struktur birokrasi, kondisi lingkungan, dan tujuan kebijakan mempengaruhi implementasi program ADD di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang ?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Ciri utama dari kebijakan publik adalah bahwa kebijakan itu bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan oleh orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik, hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh David Easton yang mengatakan kebijakan publik dirumuskan oleh mereka yang memiliki wewenang dalam sistem politik.

Dalam terminologi ini, kebijakan publik dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan riil yang muncul ditengah-tengah masyarakat untuk dicarikan jalan keluar baik melalui peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan pejabat birokrasi dan keputusan lainnya termasuk peraturan daerah, keputusan pejabat politik dan sebagainya.

Dengan demikian kebijakan publik adalah produk dari pemerintah maupun aparat pemerintah :

pilihan-pilihan yang dianggap paling baik, untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi publik dengan tujuan untuk dicarikan solusi pemecahannya secara tepat, cepat dan akurat, sehingga benar adanya apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan pemerintah dapat saja dipandang sebagai sebuah pilihan kebijakan.

Implementasi Kebijakan Publik.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab:1991) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk administrasinya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Maarse berpendapat bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam kurun waktu tertentu (Sunggono:1994). Implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program-program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya terhadap dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik

1. Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana
Subarsono (2005) menyatakan bahwa Karakteristik dan Kapabilitas Instansi Pelaksana adalah ciri - ciri, sifat - sifat, sikap perilaku, kemampuan dan peran instansi pelaksana dalam mengimplementasikan program/kegiatan

dalam mencapai keberhasilan atau kegagalan.

2. Kondisi Lingkungan
Robbins (2003) menyatakan bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan organisasi itu sendiri terdiri dari lembaga – lembaga atau kekuatan – kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu.
3. Komunikasi/Hubungan antar Instansi
Menurut Widjaja (2000) mengatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diusahakan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku.
4. Sumber Daya Organisasi
Menurut Winarno (2002) menyebutkan bahwa sumber daya organisasi adalah sumber - sumber yang akan mendukung kebijakan Program ADD yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas.
5. Sikap
Menurut Mar'at (1982) menyatakan bahwa Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan dan pengetahuan. Namun di samping itu evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afeksi. Semua hal ini dengan sendirinya berhubungan dengan obyek. Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dalam sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek yang dihadapi pertama adalah berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang. Sehingga komponen kognisi melukiskan obyek tersebut, dan sekaligus dikaitkan dengan obyek - obyek lain di sekitarnya.
6. Struktur Birokrasi

Menurut Sutarto (1995) organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Struktur Organisasi/Birokrasi adalah sebagai tata pola yang menghubungkan antara bagian - bagian kerja berdasarkan kedudukan dan jenis kewenangan pejabat, bidang-bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggungjawab, rentang kendali dan sistem manajemen dalam organisasi yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah yang sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun di negara kita diharapkan bukan hanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk menggeser kekuasaan. Hal itu ditegaskan oleh (Kaloh:2002) bahwa: “otonomi daerah harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah dan bukan otonomi “daerah” dalam pengertian wilayah/teritorial tertentu di tingkat lokal”.

Otonomi daerah bukan hanya merupakan pelimpahan wewenang tetapi juga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal yaitu : “suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan”. Menurut (Khusaini:2006) desentralisasi fiskal merupakan “pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat”.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan

penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, bagi hasil pajak dan bukan pajak, pinjaman, maupun subsidi/bantuan dari pemerintah pusat.

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Usman dan Akbar (2004:4) penelitian deskriptif bermaksud membuat penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.

Fokus Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah dalam penelitian ini, maka fokus penelitian diarahkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi proses Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang terdiri dari 34 Desa/Kelurahan. Untuk membatasi lingkup penelitian telah ditetapkan desa sampel secara *purposive* yang meliputi 8 Desa dan 2 Kelurahan. Pemilihan desa-desa sampel tersebut secara geografis mewakili karakteristik wilayah pesisir dan pertanian yang telah memanfaatkan alokasi ADD pada tahun 2013. Adapun waktu penelitian dilakukan selama dua bulan pada bulan Mei s/d Juni 2014.

Jenis Dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder, diantaranya:

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun responden adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat. Sebagai informan kunci adalah Camat Rembang.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa serta dokumen-dokumen, meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, APBD Desa, monografi Kecamatan, kondisi sarana dan prasarana, dan lain-lain.

Instrumen Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, instrumen utamanya adalah kuesioner yang disebar dan diisi oleh responden serta pedoman wawancara berupa sejumlah pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur apabila dianggap perlu untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dari responden.

Pemilihan Responden dan Informan

Pada setiap desa yang telah terpilih sebagai sampel, selanjutnya ditentukan responden penelitian yang akan menjadi sampel subjek penelitian dengan menggunakan teknik *judgement sampling*. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah dari unsur pemerintah desa, diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan

Bendahara, sedangkan pihak LPMD diwakili oleh ketua dan anggota yang berkompeten dalam pengelolaan ADD.

Pada setiap desa yang terpilih sebagai sampel terdapat 10 orang responden yang merupakan representasi masyarakat penerima ADD. Untuk memperoleh data dan informasi pendukung yang valid dan akurat, dilakukan wawancara secara mendalam, terhadap narasumber yang dijadikan sumber informasi tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Prosedur pengambilan informan awal dilakukan secara purposive. Sedangkan informan selanjutnya dengan teknik *snowball*, yaitu mengambil satu orang untuk diwawancarai selanjutnya bergulir kepada informan lain secara berantai hingga diperoleh sejumlah informan yang diperlukan.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan :

1. Studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen,
2. Tanya jawab berdasarkan kuesioner dengan Pemerintah Kecamatan Rembang, Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Rembang, Badan Permasyarakatan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, target group, dan non-target group yang relevan dengan masalah penelitian.

Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Deskriptif Kualitatif. Untuk mengetahui seberapa jauh faktor-faktor terhadap implementasi ADD dilakukan model pengukuran skala likert untuk mengukur persepsi seseorang terhadap satu gejala sosial (Taylor, 2006). Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan faktor dan subfaktor yang mempengaruhi implementasi ADD yaitu:

Tabel 3.2.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi ADD

FAKTOR	SUB FAKTOR	
Komunikasi (F1)	1	Sosialisasi kebijakan ADD dilaksanakan dari tingkat Kabupaten hingga Desa.
	2	Kebijakan ADD dikomunikasikan dan dipahami secara jelas hingga para pelaksana tingkat desa.
	3	Ketentuan dan aturan kebijakan ADD disampaikan secara konsisten dari tingkat Kabupaten hingga Desa .
Sumberdaya (F2)	1	Sumberdaya manusia pelaksana ADD mempunyai kemampuan memadai untuk menyelesaikan seluruh kegiatan ADD.
	2	Fasilitas-fasilitas pendukung cukup tersedia untuk membantu pelaksanaan kegiatan ADD
Sikap (F3)	1	Pelaksana ADD mendukung sepenuhnya kebijakan ADD di desanya
	2	Pelaksana ADD cepat tanggap (responsif) atas kebijakan ADD di desanya
	3	Pelaksana ADD melakukan tindak lanjut atas kebijakan ADD di desanya
Struktur Birokrasi (F4)	1	Struktur organisasi pelaksana ADD telah dibentuk sesuai dengan pengelompokkan kerja dari masing – masing pelaksana ADD
	2	Pembagian kerja telah dilaksanakan sesuai tugas masing-masing pelaksana ADD
	3	Koordinasi dari para pelaksana ADD telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Lingkungan (F5)	1	Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa mempunyai kemampuan memadai untuk berperan dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.
	2	Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa berperan secara kontinyu dalam mendukung kebijakan Alokasi Dana Desa.
	3	Banyak lembaga-lembaga diluar organisasi pelaksana ADD yang mempengaruhi kebijakan Alokasi Dana Desa .
Ukuran Dan Tujuan Kebijakan (F6)	1	Pelaksanaan kegiatan ADD telah sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan (juknis).
	2	Pelaksanaan kegiatan ADD telah tepat sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang direncanakan (DURK).

2. Menentukan skor nilai untuk setiap variabel pada setiap faktor tersebut, dengan skor dari nilai 1 (untuk nilai yang paling rendah) dan 10 (untuk nilai yang paling tinggi)
3. Untuk menemukan faktor apa yang paling kuat dari semua faktor tersebut (F1,F2, F3, F4, F5 dan F6) pada setiap permasalahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menghitung rata-rata nilai setiap sub faktor pada setiap faktor dari semua jawaban responden

Created with

- b. Menghitung nilai rata-rata faktor (*grand average*) dengan cara menghitung rata-rata dari rata-rata nilai setiap sub faktor pada setiap faktor (Fg1, Fg2, Fg3, Fg4, Fg5, dan Fg6)
- c. Menghitung deviasi standard untuk setiap nilai rata-rata faktor (*grand average*); STD
- d. Menentukan Kategori kekuatan faktor yang mencakup 5 (lima) kategori yaitu: (1) Lemah, (2) agak lemah, (3) sedang, (4) kuat, dan (5) sangat kuat; dengan cara dan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Kriteria Pengukuran Kekuatan Faktor

Batasan	Kriteria Pengaruh
$X_r - 1.5 \text{ STD} < N$	Lemah
$X_r - 1,5 \text{ STD} < N < X_r - 0.5 \text{ STD}$	Agak Lemah
$X_r - 0.5 \text{ STD} < N < X_r + 0.5 \text{ STD}$	Sedang
$X_r + 0.5 \text{ STD} < N < X_r + 1.5 \text{ STD}$	Kuat
$X_r + 1.5 \text{ STD} < N$	Sangat Kuat

Keterangan :

X_r : Nilai Rata-rata faktor(F1, F2, F3,F4, F5 dan F6)

STD : Deviasi Standar indikator

N : Nilai faktor(F1, F2, F3, F4, F5 dan F6)

Adapun teknik analisis data selanjutnya menggunakan teknikanalisiskomponensial yangmerupakan teknikanalisisdatakualitatif melaluianalisissterhadapunsur-unsuryang memilikihubungan-hubungan kontrassatu samalain dalam domain-domainyangtelahditentukanuntuk dianalisissecara lebihterperinci.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ImplementasiPelaksanaanAlokasiDanaDesa (ADD).

Secaraumumpelaksanaan AlokasiDanaDesa(ADD)telah berjalan dengan baik.Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADDdi Kecamatan Rembang masih terdapat kendala. Haltersebut dapatdiketahui melaluiberbagaifenomenayang penulistemukanselamamelaksanakan penelitian.

a. ProsesImplementasiKebijakan

1) PenyusunanRencanaKegiatan.

Penyusunanrencana kegiatanADDtelah berjalandenganbaik terbukti dari tersusunnyaDURK,hal inidikarenakanDURKmenjadisyarat pencairanADD. Dari informasi ini dapat dikatakan bahwasemuadesadi KecamatanRembangtelah menyusunrencanakegiatanADDmelaluiDURK.

2) PenyelesaiankegiatanADD semuakegiatanADDdiwilayah Kecamatan Rembangtelah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun seringkali masih mengalami kelambatan. Informasi ini menggambarkan bahwa kegiatan ADDyang sudahdirencanakandalamDURK secara fisik terselesaikan.

3) PertanggungjawabanKegiatanADD. Pertanggungjawaban kegiatanADDtelah dibuat oleh tiap-tiap desa dalambentukSPJ baik untuk pencairan termin pertamamaupunyangkedua. Untuk pencairanADDtahapkeduaupun pada tahun berikutnya selalu dipersyarkan dengan lampiranSPJ, sehingga semua desa telah menyelesaikan SPJnya meskipun sering mengalami keterlambatan. Informasi tersebut menunjukkan pertanggungjawaban kegiatan ADD

telah dibuat meskipun ada keterlambatan penyusunannya.

b. Pencapaian Tujuan Kebijakan

Hasil penelitian untuk mengukur pencapaian tujuan kebijakan ADD dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kegiatan ADD telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kondisi desa-desa di Kecamatan Rembang Pendapatan Aslinya sangat rendah sangat terbantu dengan adanya ADD. Sehingga dibandingkan dengan kondisi sebelumnya ADD telah terjadi peningkatan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2) Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Secara normatif semua desa di wilayah Kecamatan Rembang telah menyusun DURK dan telah mendapat pengesahan dari Camat Rembang sesuai usulan desa, karena hal itu menjadi persyaratan dalam pencairan ADD. Namun masih ada sinyal lemah bahwa desa-desa di wilayah Kecamatan Rembang menyusun DURK lebih karena alasan memenuhi persyaratan administrasi guna pencairan ADD. Meskipun mengikutsertakan lembaga-lembaga desa dalam musyawarah desa penggunaan ADD, namun peran Kepala Desa sangat dominan dalam menentukan DURK.

Lembaga-Lembaga Desa kurang mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan ADD bahkan terdapat desa yang

tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana na pedomanyang ada, tidak pernah dilibatkan dalam implementasi ADD dan

jugatidak pernah dilibatkan dalam evaluasi implementasi ADD.

3) Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ADD cenderung rendah. Menurutnya hal ini lebih disebabkan oleh pengaruh kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian tidak semua desa mengalami hal yang sama, masih terdapat sejumlah desa dengan tingkat partisipasi masyarakat cukup bagus meskipun tidak dalam bentuk uang, namun diwujudkan dalam bentuk tenaga dan material, pembuktian nyata misalnya ketika membangun jembatan dengan dana ADD yang terbatas dapat mewujudkan jembatan senilai berkali lipat.

Dengan menggali informasi terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan ADD di atas, mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Namun lembaga-lembaga desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara optimal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam implementasi ADD menurun, maka dapat dinyatakan bahwa pencapaian tujuan kebijakan ADD belum berjalan secara optimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

Dengan menggunakan teknik survey, penelitian ini berupaya mengetahui secara empiris sejauhmana pengaruh enam faktor yaitu; Faktor Komunikasi (F1), Faktor Sumberdaya (F2), Faktor Sikap (F3), Faktor Struktur Birokrasi (F4), Faktor Lingkungan (F5) serta Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan (F6) dalam implementasi kebijakan ADD di Kecamatan

Analisi skala likert dapat digunakan untuk menilai tingkat persepsi stakeholder terkait dengan implementasi ADD terutama di sepuluh desa yang menjadi lokasi penelitian.

Data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden kemudian dilakukan tabulasi untuk memilah data berdasarkan desa sampel penelitian. Data diolah dengan menghitung jumlah dan rata-rata nilai untuk setiap faktor/sub faktor (F1 s.d F6) di masing-masing desa. Selanjutnya dengan teknik yang sama dihitung standar deviasinya. Nilai faktor dihitung dengan

mengalikan antara rata-rata faktor dengan standar deviasinya. Sedangkan kriteria pengaruh faktor-faktor disimpulkan melalui perbandingan antara hasil perhitungan nilai faktor dengan hasil perhitungan rumusan rata-rata nilai faktor (X_r) dan standar deviasi terkoreksi.

Setelah dilakukan pengolahan data, hasil penilaian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang 2013 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan ADD
Kecamatan Rembang Tahun 2013

<i>Faktor</i>	<i>Nilai Faktor</i>	<i>Kategori</i>
F1	1.01	Sedang
F2	1.35	Sangat Kuat
F3	0.67	Lemah
F4	1.35	Kuat
F5	1.01	Lemah
F6	0.67	Sangat Kuat

Sumber: Data diolah

Dari tabel penilaian di atas dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang dipersepsikan berpengaruh sangat kuat dalam implementasi ADD di Kecamatan Rembang adalah Faktor Sumberdaya (F2) serta Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan (F6). Sedangkan Faktor Struktur Birokrasi (F4) dipersepsikan berpengaruh kuat dalam implementasi ADD. Sementara Faktor Komunikasi (F1) dan Faktor Lingkungan hanya dipersepsikan berpengaruh sedang dan lemah.

Adapun pengaruh setiap faktor terhadap implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di setiap desa/kelurahan dapat diuraikan lebih mendalam dengan hasil sebagai berikut:

Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan proses terjadinya interaksi penyampaian pesan melalui mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Hasil penilaian terhadap pengaruh Faktor Komunikasi (F1) dalam implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang 2013 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10.
Pengaruh Faktor Komunikasi (F1) Terhadap Implementasi Kebijakan ADD Kecamatan Rembang Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Nilai Faktor	Kriteria Pengaruh
1.	Kel. Tanjungsari	1.09	Kuat
2.	Ds. Gegunung wetan	0.99	Sedang
3.	Ds. Tasikagung	1.00	Sedang
4.	Ds. Pandean	0.98	Lemah
5.	Ds. Kabongan lor	1.00	Sedang
6.	Kel. Sidowayah	1.13	Kuat
7.	Ds. Gedangan	1.01	Sedang
8.	Ds. Mondoteko	0.99	Sedang
9.	Ds. Pulo	0.98	Lemah
10.	Ds. Ketanggi	0.97	Lemah

Sumber: Data diolah

Untuk menguraikan bagaimana pengaruh faktor komunikasi ini, penulis akan melihatnya dari berbagai fenomena selama pengamatan di lapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa.

1) Intensitas Sosialisasi Kebijakan ADD

Terkait dengan intensitas sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku kebijakan diperoleh keterangan bahwa secara normatif kegiatan sosialisasi telah berjalan. Namun ada sebagian informan mengeluhkan kurangnya intensitas sosialisasi kebijakan ADD.

2) Kejelasan Komunikasi

Semua informasi tentang implementasi ADD sudah diuraikan secara jelas dalam buku petunjuk teknis. sebagian besar pelaksana ADD sudah cukup berpengalaman dalam melaksanakan kegiatan ADD, hanya saja dalam pengelolaan administrasi kadangkala masih membingungkan. Dari informasi ini dapat diartikan bahwa para pelaksana ADD telah memperoleh kejelasan pesan mengenai kebijakan ADD.

3) Konsistensi Pesan

Semua informasi telah disampaikan secara jelas dan mengangap tidak ada yang tumpang tindih

penjelasan Tim Kabupatendengan ketentuannya. semua informasi kebijakan ADD harus merujuk pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati Rembang. Dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan.

Fenomena empiris dari faktor komunikasi di atas dapat menggambarkan bahwa intensitas sosialisasi kebijakan ADD masih kurang optimal karena sosialisasinya tidak dilaksanakan oleh Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Kepala Desa, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada.

Sumber Daya

Kemampuan dan ketersediaan sumber daya menjadi salah satu faktor penentu dalam implementasi ADD di Kecamatan Rembang. Hasil penilaian terhadap pengaruh Faktor Sumber Daya (F2) dalam implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang 2013 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.11,
Pengaruh Faktor Sumberdaya (F2) Terhadap Implementasi KebijakanADD Kecamatan Rembang Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Nilai Faktor	Kriteria Pengaruh
1.	Kel. Tanjungsari	1.46	Kuat
2.	Ds. Gegunung wetan	1.40	Lemah
3.	Ds. Tasikagung	1.44	Sedang
4.	Ds. Pandean	1.41	Sedang
5.	Ds. Kabongan lor	1.44	Sedang
6.	Kel. Sidowayah	1.57	Sangat Kuat
7.	Ds. Gedangan	1.45	Sedang
8.	Ds. Mondoteko	1.42	Sedang
9.	Ds. Pulo	1.37	Sedang
10.	Ds. Ketanggi	1.20	Sedang

Sumber: Data diolah

informasi bersumber dari para informan yang ternyata mempunyai tanggapan yang cukup beragam. Namun pada hakekatnya mereka sependapat tentang perlunya peningkatan sumberdaya, baik sumberdaya manusia maupun yang lainnya.

1) Kemampuan Sumberdaya Manusia.

Secara umum kondisi SDM pelaksana ADD masih terbatas sehingga mempengaruhi kualitas implementasi ADD. ADD untuk mencapai standar tepat waktu, tepat mutu dan tepat administrasi. Atau dengan kata lain para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi meskipun mereka mempunyai cukup pengalaman.

2) Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD.

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada prinsipnya para informan menyadari bahwa permasalahan utama implementasi ADD adalah kurang adanya dukungan dan dari pendapat dan sebaliknya.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana yang mendukung implementasi ADD sangat berpengaruh terhadap kualitas implementasi ADD di Kecamatan Rembang. Hasil penilaian terhadap pengaruh Faktor Sikap (F3) dalam implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang 2013 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.12.
Pengaruh Faktor Sikap Pelaksana (F3) Terhadap Implementasi Kebijakan ADD
Kecamatan Rembang Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Nilai Faktor	Kriteria Pengaruh
1.	Kel. Tanjungsari	0.77	Sedang
2.	Ds. Gegunung wetan	0.80	Kuat
3.	Ds. Tasikagung	0.76	Sedang
4.	Ds. Pandean	0.80	Kuat
5.	Ds. Kabongan lor	0.80	Kuat
6.	Kel. Sidowayah	0.77	Sedang
7.	Ds. Gedangan	0.74	Lemah
8.	Ds. Mondoteko	0.75	Sedang
9.	Ds. Pulo	0.80	Sedang
10.	Ds. Ketanggi	0.70	Sedang

Sumber: Data diolah

Sejauhmana pengaruh faktor sikap pelaksana dalam implementasi ADD, penulis dapat menjelaskan melalui informasi bersumber dari para informan Dalam hal ini para informan cenderung berpandangan sama yaitu sikap pelaksana yang mendukung implementasi ADD.

- 1) Persepsi Pelaksana
 Pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan.
- 2) Respon Pelaksana
 Respon pelaksana cukup beragam, tidak semua kepala desa merespon dengan baik kebijakan ADD terbukti masih banyaknya desa yang lambat melengkapi persyaratan ADD. Informasi ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadirutinitas setiap tahun.
- 3) Tindakan Pelaksana

Walaupun masih ada pelaksana kebijakan ADD yang kurang respon, namun demikian semua informan menyatakan bahwa pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah tindak lanjut. Para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa kegiatan penyusunan DURK, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan balai desa, jalan dan jembatan.

Struktur Organisasi Pelaksana

Struktur birokrasi berpengaruh langsung terhadap kelancaran implementasi ADD di Kecamatan Rembang. Hasil penilaian terhadap pengaruh Faktor Struktur Organisasi (F4) dalam implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang 2013 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13.
Pengaruh Faktor Struktur Organisasi Pelaksana (F4) Terhadap Implementasi Kebijakan ADD Kecamatan Rembang Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Nilai Faktor	Kriteria Pengaruh
1.	Kel. Tanjungsari	1.36	Kuat
2.	Ds. Gunung wetan	1.25	Lemah
3.	Ds. Tasikagung	1.30	Sedang
4.	Ds. Pandean	1.27	Sedang
5.	Ds. Kabongan lor	1.29	Sedang
6.	Kel. Sidowayah	1.39	Kuat
7.	Ds. Gedangan	1.31	Sedang
8.	Ds. Mondoteko	1.29	Sedang
9.	Ds. Pulo	1.26	Sedang
10.	Ds. Ketanggi	1.28	Sedang

Sumber: Data diolah

Sejauhmana pengaruh faktor struktur organisasipelaksana dalam implementasi ADD, penulis dapat menjelaskan melalui informasi bersumber para informan yang mempunyai tanggapan senada, yaitu telahadanyastrukturorganisasipelaksanakebijakanADD.

Meskipun demikianperluadanyapembagian tugas yang jelas dari parapelaksanaADD.

1).PembentukanStrukturOrganisasi

Pembentukan strukturorganisasipelaksanaADD telah dilakukan di setiap desa, sebagaimana disampaikan oleh lurah Tanjungsari bahwa strukturorganisasidalamimplementasi ADDdiatur dalam juknis Bupati

2).PembagianTugas

Dalam halpembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan memberikan pernyataan yang senada.Sekretaris Desa Ketanggi menyatakan bahwa tidakadapembagian tugas yang jelas, sehinggasepertinyaKepala Desasaja yangmenangani semua, selaku PJAK tugasnya hanya mengurus pembuatan SPJ saja. Hal ini menyiratkan bahwabawapelaksanaADD belum melakukanpembagian tugas, sehingga LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti

akan tugas dan kewenangannya dalam implementasi ADD.

3).KoordinasiParaPelaksanakebijakan

Dalam hal lemahnya koordinasi para pelaksana kebijakan ADD disampaikan oleh Sekretaris Desa Pulo. Menurut pengalamannya hanya Kepala Desanya bekerjasendiri sehinggasya tidak tahu apa yang harus dikerjakan oleh pelaksana lain dalam implementasi ADD. Berkaitan dengan informasi ini, saat dikonfirmasi Camat Rembang menjawab secara normatif bahwa sebenarnya dalam juknis ADD telah diatur pembagian tugas di antara para pelaksana ADD, namun persoalan koordinasi sering tidak jalan. Menurutnyahal ini sering disebabkan kurang saling percaya.

Lingkungan

Lembaga-lembaga masyarakat mempunyai peran yang cukup besar guna menyalurkan aspirasi dalam implementasi ADD di Kecamatan Rembang. Hasil penilaian terhadap pengaruh Faktor Lingkungan (F5) dalam implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang

pada tabel berikut:

Tabel 4.14.
Pengaruh Faktor Lingkungan (F5) Terhadap Implementasi Kebijakan ADD Kecamatan Rembang Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Nilai Faktor	Kriteria Pengaruh
1.	Kel. Tanjungsari	1.12	Kuat
2.	Ds. Gegunung wetan	1.08	Sedang
3.	Ds. Tasikagung	1.07	Sedang
4.	Ds. Pandean	1.09	Sedang
5.	Ds. Kabongan lor	1.09	Sedang
6.	Kel. Sidowayah	1.12	Sedang
7.	Ds. Gedangan	1.10	Sedang
8.	Ds. Mondoteko	1.12	Kuat
9.	Ds. Pulo	1.09	Sedang
10.	Ds. Ketanggi	1.07	Sedang

Sumber: Data diolah

Sejauh mana pengaruh faktor lingkungan dalam implementasi ADD, penulis dapat menjelaskan melalui informasi bersumber para informan yang cukup beragam.

1). Kapasitas Lingkungan

Kapasitas lingkungan yang penulis lakukan penelitian adalah terkait dengan kemampuan BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mempengaruhi kebijakan ADD. BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD sedangkan lembaga kemasyarakatan akan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan ADD.

2). Kestabilan Peran

Terkait kestabilan peran BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam mendukung kebijakan ADD, Camat Rembang menyatakan bahwa BPD telah ikut mendukung kebijakan ADD dengan ikut mengawasi implementasi ADD namun LPMD belum menjalankan tugasnya membantu Kepala Desa dalam implementasi ADD yang bersifat fisik.

3). Kompleksitas Lingkungan

Disinggung mengenai masalah kompleksitas lingkungan yaitu seberapa banyak campur tangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap pelaksanaan kebijakan ADD, para informan memberikan pandangan yang beragam. Masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbang tenaga dan gotong royong dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya Lembaga Kemasyarakatan dalam implementasi ADD.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Ukuran dan tujuan kebijakan adalah sarana untuk mengevaluasi implementasi ADD di Kecamatan Rembang. Hasil penilaian terhadap pengaruh Faktor ukuran dan Tujuan Kebijakan (F6) dalam implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Rembang 2013 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15.
Pengaruh Faktor Tujuan Kebijakan (F6) Terhadap Implementasi Kebijakan ADD
Kecamatan Rembang Tahun 2013

No	Desa/Kelurahan	Nilai Faktor	Kriteria Pengaruh
1.	Kel. Tanjungsari	0.73	Kuat
2.	Ds. Gegunung wetan	0.71	Sedang
3.	Ds. Tasikagung	0.71	Sedang
4.	Ds. Pandean	0.72	Sedang
5.	Ds. Kabongan lor	0.70	Sedang
6.	Kel. Sidowayah	0.74	Kuat
7.	Ds. Gedangan	0.74	Kuat
8.	Ds. Mondoteko	0.72	Sangat Kuat
9.	Ds. Pulo	0.62	Sedang
10.	Ds. Ketanggi	0.60	Sedang

Sumber: Data diolah

Pada prinsipnya telah terdapat kesesuaian program dengan kebijaksanaan ADD serta adanya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD yang telah ditentukan, sebagaimana hasil penelitian berikut ini:

Berkaitan dengan kesesuaian program dengan kebijaksanaan ADD, pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADD, antara lain tiga puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa dan tujuh puluh persen untuk pemberdayaan masyarakat demikian juga tidak ada desayang melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Juknis.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan dibahas tentang implementasi ADD dalam kaitannya dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Pertama pembahasan implementasi dari aspek *compliance*, yaitu sejauh mana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai tujuannya, dalam hal ini meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga masyarakatan di desa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.

Implementasi Kebijakan ADD.

Bertumpu pada informasi yang telah digali dari para informan, maka dapat dikatakan bahwa implementasi ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik. Akan tetapi bila dihubungkan dengan pendapat Van Metter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya, maka timbul pertanyaan apakah implementasi kebijakan ADD telah mencapai tujuan?

Hubungan Komunikasi dan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi sebuah kebijaksanaan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Menurut George Edward III (1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3(tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clarity, consistency. Dari hasil penelitiannya dalam hubungan komunikasi dengan implementasi ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat.

Beberapa faktor pendorong tersebut meliputi: (a) sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, (b) pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar serta (c) terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan ADD belum ada, sehingga pemahaman masyarakat mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam implementasi ADD maupun dalam pengawasan kegiatan.

Hubungan sumber daya dengan Implementasi Kebijakan

Hubungan sumber daya dengan implementasi ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut meliputi: (a) kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan ADD, meskipun hanya berupa tenaga dan material, (b) kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam implementasi ADD, (c) tersedianya sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakan ADD, serta (d) kontribusi masyarakat terhadap kebijakan ADD berupa tenaga dan material. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah rendahnya pendidikan para pelaksana ADD, sehingga pemahaman pelaksana mengenai ADD kurang,

serta tidak adanya dukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkan kurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan.

Hubungan sikap pelaksana dengan Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian terhadap sikap pelaksana terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Beberapa faktor pendorong tersebut adalah (a) Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD. (b) Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana ADD, berupa penyusunan DURK dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanaan adalah kurangnya responnya para pelaksana ADD yang menganggap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka.

Hubungan struktur birokrasi dengan Implementasi Kebijakan

Hubungan struktur organisasi dengan implementasi ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat, yaitu:

1. Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD di semua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Masyarakat dan Desa. Sedangkan
2. Faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya pembagian tugas di antara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana ADD.

Hubungan Lingkungan dengan Implementasi Kebijakan

hubungan lingkungan

implementasi ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut meliputi; (a) adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas implementasi ADD oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu implementasi ADD, (b) sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi implementasi ADD serta (c) adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu implementasi ADD, bahkan Lembaga Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam implementasi ADD.

Hubungan Ukuran dan Tujuan Kebijakan dengan Implementasi Kebijakan

hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan implementasi ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah adanya kesesuaian antara implementasi ADD dengan kebijakan Bupati mengenai ADD meskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk program oleh desa-desadi wilayah Kecamatan Rembang, karena disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi direncanakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Rembang Kabupaten

Rembang secara administratif berjalan cukup baik. Kondisi ini dapat diungkapkan dari terlaksananya tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Namun demikian pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa masih ada yang belum optimal.

2. Peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana kegiatan sedang dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan.
3. Peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini juga belum optimal. Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, swadaya gotong royong dalam bentuk tenaga dan material.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang adalah komunikasi (F1) dengan nilai sebesar 1,01 (sedang), kemampuan sumber daya (F2) dengan nilai sebesar 1,02 (sangat kuat), sikap pelaksana (F3) dengan nilai sebesar 0,67 (kuat), struktur birokrasi (F4) dengan nilai sebesar 1,35 (kuat), lingkungan (F5) dengan nilai 1,01 (lemah) serta ukuran dan tujuan kebijakan (F6).

Saran

Beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki atau pun menyempurnakan implementasi ADD di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang masa datang. Saran-saran dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi terhadap kebijakan ADD yang diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami

- masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam implementasi ADD, ikut melestarikan hasil implementasi ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Meningkatkan pengetahuan yang diberikan para pelaksana ADD melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.
 3. Mendorong proses internalisasi kegiatan ADD dalam bentuk pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana..
 4. Pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang kedudukan, tugas dan fungsi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) khususnya dalam implementasi ADD.
 5. Dalam rangka sinergi penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno. (1989). *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Hessel, Nogi. Tangkilisan, (2003). *Implementasi Kebijakan Publik, Transformasi Pikiran George Edward*, Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Hawthorne, 1978. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* hal. 67, NY: Aldine Publishing Company.
- Islamy, M. Irfan (1997). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, cetakan ke-8, Jakarta.
- Khusaini, Mohammad, dkk., (2006). *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal Dan Pembangunan Daerah* Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang.
- Moloeng, Lexy J., (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mar'at. (1982). *Sikap Manusia: Perubahandan Pengukuran*, Ghalia Indonesia, Bandung.
- Oskamp, Stuart dan Schultz, P. Wesley (1998). *Applied Social Psychology*, Edisi Kedua, Prentice Hall, San Marcos.
- [8] Taylor, Bill, dkk.. (2006). *Research Methodology: A Guide To For Reseachers In Management And Social*, Prentice-Hall, New-Delhi.
- Wahab, Solichin Abdul, (1997). *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Widjaja, (2000). *Ilmu Komunikasi Pengantar Study*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.